

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan *Good Governance*

Implementation of Control Function of Regional House of Representative in Creating Good Governance.

Suji¹

Staf Pengajar Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

ABSTRACT

This research showed that the accomplishment control of regional house of representative to the implementation of Bojonegoro local regulation number 8 / 2006 about rural government was not optimal yet. The members competence of the A commission of regional house of representative were good enough, but there were less of the integrity, honesty, and the responsibility. Moreover, there were problems in establishing control function. As a result, the controlling did not run well and the good governance in Bojonegoro did not realize yet. Legislative control is one of the essential elements in the running of good governance, but it must be balanced by high integrity, honesty, and responsibility of Bojonegoro regional house of representative. Hopefully, high integrity, honesty, and responsibility can reduce the problems, so that the controlling can run well in establishing good governance.

Key words: regional autonomy, legislative control, good governance

ABSTRAK

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda kabupaten Bojonegoro No. 8 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, masih belum optimal, walaupun kompetensi para anggota dewan khususnya di komisi A mendapatkan penilaian cukup baik. Namun integritas, kejujuran, dan tanggung jawab yang dimilikinya masih rendah disamping terdapatnya kendala-kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasan, menyebabkan pengawasan yang dilakukan tidak dapat berjalan dengan baik. Sehingga penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), di kabupaten Bojonegoro masih belum terwujud. Pengawasan legislatif merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), namun harus diimbangi dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab yang tinggi dari para anggota DPRD kabupaten Bojonegoro. Karena dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab yang tinggi diharapkan dapat meredusir kendala-kendala di lapangan dan pengawasan dapat dilakukan dengan baik, dengan demikian penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dapat tercapai.

Kata kunci : otonomi daerah, pengawasan legislatif, *good governance*

¹Alamat Korespondensi : Jl. Kalimantan I, gg Citra no. 55 Jember. Email: suji42@gmail.com